

PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI SEKOLAH DASAR NEGERI 016 KOTA SAMARINDA

Yudha Aditya¹, Adam Idris², Anwar As³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mendeskripsikan Peran Dinas Pendidikan Dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di SDN 016 Kota Samarinda dan faktor penghambatnya, Jenis penelitian ini kualitatif-deskriptif yang dimana teknik pengumpulan datanya melalui sumber kepustakaan, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi pada kegiatan penelitian langsung dilapangan serta dengan penggunaan teknik analisis data dan model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007:189). Demikian hasil penelitian yang telah peneliti analisis secara keseluruhan bahwa peran dinas pendidikan sudah menerapkan pendidikan gratis disekolah-sekolah negeri dengan cara membebaskan biaya masuk sekolah dan biaya tambahan dalam proses belajar mengajar siswa serta turut menyelenggarakan program nasional Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diperuntukan khusus untuk siswa miskin dan tidak mampu. Sementara itu masih terdapat faktor penghambat peran dinas pendidikan karena kemampuan dana Bos yang telah dialokasikan terdapat keterbatasan untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan operasional sekolah.

Kata Kunci: *Peran, pendidikan, gratis*

Pendahuluan

Permasalahan biaya pendidikan bagi setiap wali murid di Kota Samarinda maupun khususnya wali murid di SDN 016 Samarinda sebagai fokus lokasi penelitian karena adanya kekhawatiran bahwa program pendidikan gratis hanya menjadi janji kampanye pemerintah saja, sumber yang paling nampak adalah ketidakpastian pendidikan gratis ini, contohnya pemberitaan pada MediaMerdeka.com/2017/7/18 pada kasus penerimaan murid baru yang menjadi sorotan dimedia sosial terkait pungutan biaya masuk yang dianggap tidak transparansi dan seolah-olah pungutan ini keputusan sepihak saja tanpa adanya persetujuan komite sekolah sehingga menjadi polemik ditengah masyarakat dan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: adith_yudha@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

pengaruhnya sangat mengurangi semangat keterjangkauan pendidikan bagi seluruh warga negara yang digaungkan.

Permasalahan pungutan pendidikan ini akan berkorelasi positif tatkala memperhatikan aspek utama melalui berdayakan akuntabilitas pungutan, aspek ini merupakan konteks utama dalam mempertanyakan pungutan Pendidikan, contohnya kepentingan adanya pungutan yang dilakukan di SDN 016 Samarinda bersumber dari *TribunNews.com/2017/07/20* bahwa intruksi dari anggota dewan Kota Samarinda kepada Dinas Pendidikan akan evaluasi kasus pungutan ini, tanggapan anggota dewan sangat prihatin terjadinya pungutan karena alasan peruntukan biaya terkait gedung sekolah merupakan pelanggaran aturan, kejelasan besaran dan manfaat pungutan harus mendapat tempat yang akuntabel jika digunakan untuk keperluan seragam diluar biaya masuk sekolah bisa saja dipungut dengan ketentuan dibicarakan seksama bersama wali murid terlebih dahulu.

Fenomena yang marak terjadi dilingkungan pendidikan ini membuat publik dituntut sudah sedemikian cerdas menyikapi apakah penarikan sejumlah pungutan merupakan benar-benar kebutuhan dari pihak sekolah atau membuka peluang segelintir oknum. Memang kita sadari bahwa hubungan erat pendidikan dan pendanaannya tak dapat dipisahkan merupakan elemen kehidupan yang memerlukan biaya ekstra dan sebagai investasi jangka panjang bagi semua pihak tetapi sangatlah disayangkan apabila misi pendidikan ini dikacaukan dengan tindakan sepihak yang senantiasa direspon negatif, tanpa ada upaya klarifikasi karena penghilangan pungutan memang memerlukan energi lebih untuk mewujudkannya.

Tentunya pemerintah diharapkan dalam mengeluarkan kebijakan terkait program pendidikan gratis, agaknya lebih dahulu melakukan berbagai pertimbangan seperti kebijakan sekolah gratis ini dirasa perlu pendalaman dan observasi untuk mengkaji lebih jauh tentang baik tidaknya kebijakan ini diterapkan sekarang, program pendidikan gratis ini seakan dipaksakan (belum ada persiapan matang) dan bermuatan politis hanya janji pilkada. Namun, dengan kenyataan seperti ini kebijakan tersebut selanjutnya adalah segera mengevaluasi program pendidikan gratis yang akan datang dan memperbaikinya disana sini. Sehingga perwujudan program pendidikan gratis yang diperuntukan demi rakyat akan lebih terasa tanpa beban apapun.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah peneliti uraikan sehingga peneliti tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut melalui judul skripsi ini yaitu "Peran Dinas Pendidikan Dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Sekolah Dasar Negeri 016 Kota Samarinda".

Kerangka Dasar Teori

Peran Dinas Pendidikan

Sering kita mendengar tentang kata peran atau peranan dalam kehidupan sehari-hari, namun belum tentu semua orang mengerti arti kata tersebut. Berbagai

definisi tentang kata arti peranan telah dikemukakan oleh para ahli W.J.S. Poerwadarminta (2002:751) mengemukakan bahwa “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena jika melihat dari pengertian tersebut keduanya saling berhubungan.

Menurut Soerjono Soekanto (1987:221) mengemukakan definisi “peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan”. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa peranan merupakan suatu aspek dinamis kedudukan atau status.

Sementara itu, menurut Bryant dan White dalam Amira (2012:9) menyatakan bahwa peran didefinisikan sebagai suatu deskripsi “pekerjaan untuk seseorang atau individu yang mengandung harapan-harapan tertentu yang tidak mempedulikan siapa yang menduduki suatu posisi tersebut”. selaras dengan pendapat menurut David Berry (2003:105), mendefinisikan “peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan social tertentu”. Jadi, harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma social dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Dari beberapa konsep di atas dapat diambil pengertian bahwa peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kedudukan (status) sebagai bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan. Dari pengertian tersebut bila dikaitkan dengan fungsi pemerintahan, maka definisi peran pemerintah dalam dinas pendidikan adalah organisasi yang menjalankan tugas –tugas Negara dan fungsi-fungsi pemerintahan daerah di Kota Samarinda dalam hal ini adalah peran Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan program penyelenggaraan pendidikan gratis bertujuan pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak pada umumnya dan khususnya perhatian pada keluarga yang tidak mampu dan miskin di Kota Samarinda.

Dinas-dinas pemerintahan daerah sekalipun tugas dan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa terlalu memperhitungkan untung dan rugi, tetapi dalam batas –batas tertentu dapat didaya gunakan sebagai organisasi yang memberikan pelayanan yang berorientasi pada pengembangan daerah. Menurut Sihombing (2001:172) ada beberapa peran yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam menata dan memantapkan pelaksanaan pendidikan yang berbasis masyarakat adalah sebagai

berikut: (1) Sebagai Fasilitator, (2) Sebagai Pelayan Masyarakat, (3) Sebagai Pendamping, (4) Sebagai Mitra, (5) Sebagai Penyandang Dana.

Pengertian Program dan Pelaksanaan Program

Menurut Charles O. Jones, (1996:295) pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Sementara itu definisi program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Charles O.Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones dalam Siti Erna Latifi Suryana (2009: 28) bahwa ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

1. Pengorganisasian Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
2. Interpretasi Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
3. Penerapan atau Aplikasi Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Setiap pemerintahan memiliki program-program kerja yang harus di realisasikan selama ia menjabat, program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang di laksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan (Raharjo Adisasmita,2011: 10). Program kerja pemerintah tidak bisa terelasisasikan tanpa adanya sosialisasi ke masyarakat. Cara sosialisasi pemerintah yang efektif adalah dengan cara komunikasi.

Selanjutnya pengertian program itu sendiri, menurut Charles O. Jones (1996: 294) bahwa “program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan”. Dalam pengertian tersebut menggambarkan bahwa program-program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri. Dalam hal ini, program pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan kebijakan

pemerintah yang telah ditetapkan. Program-program tersebut muncul dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Pelaksanaan program menjadi penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis

Definisi Pendidikan

Pengertian pendidikan dapat dilihat dari segi bahasa dan istilah, dari segi bahasa, pendidikan berarti “proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan”. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI,2001: 232)

Pendidikan dari segi istilah, menurut para ahli, yakni sebagai berikut:

1. Ahmad D. Marimba berpendapat bahwa: Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.(Ahmad D. Marimba,1989: 16)
2. Ki Hadjar Dewantoro berpendapat: Pendidikan adalah tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dari sebagai anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. (Suwarno,1992: 2)

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan adalah suatu proses pendewasaan, yaitu suatu upaya memberi pertolongan secara sadar atau sengaja pada seorang anak dalam pertumbuhannya menuju kedewasaan baik jasmani maupun rohani, agar dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas segala tindakannya.

Penyelenggaraan Pendidikan Gratis

Amanat Negara tentang pendidikan gratis yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (4) menegaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan baik pendidikan secara formal maupun nonformal.

Pendidikan yang terselenggara di Indonesia belum dapat menampung semua anak usia sekolah untuk mengenyam pendidikan. Hal ini disebabkan oleh

mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan harus terus berlangsung dan pendidikan membutuhkan biaya dalam operasionalnya. Pendidikan gratis bukan berarti penyelenggaraan pendidikan tanpa biaya sama sekali, melainkan biaya pendidikan pada sekolah/madrasah diambil alih oleh pemerintah dengan memberikan dana bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.

Penelitian ini difokuskan pada;

1. Peran Dinas Pendidikan Dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di SDN 016 Kota Samarinda, sebagai berikut:
 - 1.1 Peran Sebagai Fasilitator
 - 1.2 Peran Sebagai Pelayan Masyarakat
 - 1.3 Peran Sebagai Pendamping
 - 1.4 Peran Sebagai Mitra
 - 1.5 Peran Sebagai penyandang Dana
2. Faktor penghambat Peran Dinas Pendidikan Dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di SDN 016 Kota Samarinda

Hasil Penelitian

Peran Dinas Pendidikan dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di SDN 016 Kota Samarinda

Peran Sebagai Fasilitator

Pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu membuka jalan, mampu membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani. Contohnya; Memperbaiki sekolah yang mulai rusak, menyediakan ijazah kejar paket bagi masyarakat yang putus sekolah dan contoh yang lainnya. Terkait peran pemerintah sebagai fasilitator, demikian peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bapak Muchlis, S.Pd, M.Pd menjabat Kasi. Kelembagaan Peserta Didik Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

Hasil wawancara diatas bersama Bapak Muchlis, S.Pd, M.Pd, demikian peneliti dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa peran dinas pendidikan dalam tugas memenuhi kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana sekolah sangat dipengaruhi oleh ketergantungan sekolah pada dana bantuan operasional sekolah (dana bos) yang telah dialokasikan, tetapi pemeliharaan dan perawatan fasilitas

sekolah sangat fleksibel dan dinamis sehingga tidak dapat mengakomodir setiap kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan sekolah.

Hasil wawancara diatas, demikian peneliti dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa peran pihak sekolah SDN 016 Samarinda berusaha untuk menjujung skala prioritas untuk mengelola kedanaan dalam menunjang jalannya proses belajar mengajar disekolah.

Peran Sebagai Pelayan Masyarakat

Dalam mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat seharusnya pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melayani masyarakat, merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Pemerintah dengan semua aparat dan jajarannya perlu menampilkan diri sebagai pelayan yang cepat tanggap, cepat memberikan perhatian, tidak berbelit-belit, dan bukan minta dilayani.

Masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama. Bentuk Pelayanan, contohnya; Mempermudah masuk ke sekolah dari mulai SD sampai Perguruan Tinggi, Melakukan kegiatan untuk menghilangkan buta huruf usia lanjut, Menerima masukan dari masyarakat tentang kurangnya pendidikan setiap desa-desa terpencil, Mempunyai solusi agar setiap masyarakat bisa sekolah dengan cara tidak dibebani biaya sekolah, Membantu mencarikan tenaga pendidik yang masih sangat dibutuhkan didaerah terpelosok dan contoh yang lainnya.

Hasil wawancara bersama Bapak Muchlis, S.Pd, M.Pd, selaku Kasi. Kelembagaan Peserta Didik Dinas Pendidikan Kota Samarinda maka peneliti dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa peran dinas pendidikan telah mampu memposisikan masyarakat sebagai fokus pelayanan utama dengan komitmen penyelenggaraan pendidikan gratis membuka peluang agar setiap masyarakat bisa sekolah dengan cara tidak dibebani biaya sekolah.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa peran pihak sekolah SDN 016 Samarinda yang memberlakukan pungutan kepada wali murid tetapi tidak berkomunikasi terlebih dulu bersama komite sekolah adalah sikap menyimpangi aturan, bentuk pungutan yang dipraktekan ini bukan hal yang resmi dan lebih bermasalah karena tidak mendapatkan kejelasan yang baik bagi masyarakat sehingga makna pungutan yang diharapkan pihak sekolah menjadi kesalahpahaman.

Peran Sebagai Pendamping

Acuan kerja yang dipegangnya adalah *tutwuri handayani* (mengikuti dari belakang, tetapi memberikan peringatan bila akan terjadi penyimpangan). Pada saat yang tepat mereka mampu menampilkan *ing madya mangun karsa* (bila berada diantara mereka, petugas memberikan semangat), dan sebagai pendamping, petugas harus dapat dijadikan panutan masyarakat (*Ing ngarsa sung*

tulodo). Contohnya; Kurangnya LKS pada siswa sekolah SD dan pihak sekolah meminta bantuan pihak pemerintah untuk mengusahakan pihak distributor buku secepatnya mengirim buku LKS nya.

Peran dinas pendidikan telah memanfaatkan alokasi dana bos untuk pengadaan buku-buku bahan pelajaran yang diserahkan kepada perpustakaan sekolah agar diinventarisasi dan dapat memberikan kesempatan pada murid yang tidak mampu untuk meminjam dan setiap penjualan buku-buku langsung oleh distributor penerbit buku tanpa harus melibatkan bisnis tersebut dengan oknum guru disekolah.

Peran pihak sekolah SDN 016 Samarinda dapat menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan untuk buku bahan ajaran dan ATK perlengkapan kelas dan perhatian pihak sekolah terhadap murid yang tidak mampu membeli buku yang dijual penerbit dapat meminjam diperustakaan.

Peran Sebagai Mitra

Apabila kita berangkat dari konsep pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat harus dianggap sebagai mitra. Hubungan dalam pengambilan keputusan bersifat horizontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang sama. Tidak ada sifat ingin menang sendiri, ingin tampil sendiri, ingin tenar/populer sendiri, atau ingin diakui sendiri. Sebagai mitra, pemerintah harus dapat saling memberi, saling mengisi, saling mendukung, dan tidak bersebrangan dengan masyarakat, tidak terlalu banyak campur tangan yang akan menyusahkan, membuat masyarakat pasif, dan akhirnya mematikan kreativitas masyarakat. Contoh; Pemerintah menambahkan mata pelajaran baru bagi SD, dan penambahan mata pelajaran tersebut bisa didiskusikan terlebih dahulu. Daripada nanti sudah berjalan mata pelajaran tersebut sulit di adopsi oleh siswa siswa SD.

Peran dinas pendidikan telah dapat menjadi mitra yang cukup baik dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek program pemerintah, demikian peran dinas selalu mendorong pihak sekolah untuk terus berkoordinasi dalam menanggulangi masalah yang terjadi selama jalannya proses belajar mengajar disekolah dengan menjunjung asas keterbukaan atau transparansi sehingga peran dinas dapat segera mengevaluasi hal-hal yang mudah menjadi polemik dimasyarakat segera diatasi.

Peran pihak sekolah SDN 016 Samarinda dalam mengelola pungutan ini memang terbukti tidak transparan dan tidak berkompromi sehingga menjadi sumber masalah yang membuat status sekolah dinilai buruk oleh lingkungan sekitar.

Peran Sebagai Penyandang Dana

Peran dinas pendidikan sebagai penyandang dana pendidikan memiliki keterbatasan kemampuan dalam menunjang kebutuhan sekolah sehingga dinas memberikan solusi untuk pihak sekolah bersama lembaga komite sekolah melibatkan wali murid dapat bersepakat mengumpulkan dana untuk keperluan

mendesak karena biaya kebutuhan tersebut tidak mampu ditanggung sepenuhnya oleh dana bos seperti perawatan gedung sekolah yang mulai rentan roboh.

Kemampuan pihak sekolah sebagai penyandang dana bisa memanfaatkan sewajarnya pemberlakuan pungutan setiap tahun ajaran baru sekolah kepada wali murid karena pungutan sebetulnya tidak selalu buruk tetapi juga berdampak positif untuk sarana partisipasi wali murid untuk membantu pihak sekolah, nampak pada saat kepala sekolah yang berkasus itu menjabat dulu bahwa tidak ada kendala keuangan operasional sekolah yang terhambat baik perawatan alat perlengkapan kelas maupun membayar tagihan air dan listrik yang tidak mampu sepenuhnya ditanggung dana bos, mungkin saja tidak sepenuhnya uang pungutan itu masuk kantong pribadi tetapi sebagian menutupi kekurangan biaya operasional sekolah.

Dengan demikian peneliti dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa peran pihak sekolah SDN 016 Samarinda dalam memanfaatkan pungutan mempunyai maksud baik untuk menutupi kekurangan biaya dalam menjalankan operasional sekolah karena dana bos yang diterima tidak serta merta dapat mencukupi meskipun pungutan ini tidak pernah dibenarkan oleh dinas pendidikan maupun komite sekolah.

Faktor penghambat Peran Dinas Pendidikan Dalam Program Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di SDN 016 Kota Samarinda

1. Faktor Kesesuaian Program dengan Kelompok Sasaran

Program ini tentunya menjadi bagian dari pelaksanaan wajib belajar yang diamanatkan perundang-undangan hingga peraturan yang ada di daerah bahwa poin pentingnya adalah setiap warga negara diberi kesempatan yang sama untuk dapat mengenyam pendidikan dasar, realitanya hal yang gratis ini tidak hanya memberikan dampak positif saja tetapi juga terdapat polemik di lingkungan masyarakat karena arus informasi yang kurang konkrit hingga terjadi kesalahpahaman masyarakat akan pelaksanaan program ini.

Pihak sekolah sudah melaksanakan program wajib belajar tanpa membedakan kemampuan masyarakat, kami melayani setiap wali murid yang mendaftarkan anaknya dengan prosedur yang telah diumumkan terutama perihal umur dan zonasi, kita tau bahwa sebagian masyarakat cenderung ingin serba mudah dan praktis sehingga rawan mengesampingkan aturan dan membayar uang pelicin.

2. Faktor Kesesuaian Organisasi Pelaksana Dengan Program

Kemampuan Dinas Pendidikan di daerah terkait dana bos hanya sebagai lembaga penyalur dana bos yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, tidak ada campur tangan daerah dalam penyusunan dana bos ini, dinas di daerah hanya sebatas menghitung jumlah murid setiap sekolah agar dana yang diterima dari pusat dapat diperimbangkan sesuai kapasitas murid setiap sekolah yang berbeda-beda dan kebutuhan yang diperlukan sekolah secara proporsional dan transparan.

Pihak sekolah SDN 016 Samarinda sudah menyesuaikan kemampuan pihak sekolah dalam menghadapi polemik pungutan ini, tetapi hal ini tidak semua menyalahkan seluruh pihak yang ada disekolah karena hanya sikap oknum kepala sekolah yang melakukan kebijakan sepihak pungutan tersebut.

3. Faktor Kesesuaian Kelompok Sasaran Dengan Organisasi Pelaksana
Alokasi dana bos yang sudah jelas tidak mampu mensubsidi sepenuhnya biaya untuk kebutuhan buku-buku yang dijual penerbit langsung disekolah-sekolah, tentunya hal ini tidak semua wali murid bisa mampu membeli sehingga kami dari dinas terus mensosialisasikan bantuan selain dana bos dari pemerintah pusat melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan manfaat wali murid dapat membeli keperluan buku-buku tersebut tetapi masih sebagian saja yang dapat terdata sebagai penerima maka sangat dibutuhkan partisipasi wali murid yang tergolong miskin dan tidak mampu dapat memenuhi segera syarat administrasi dengan mengumpulkan berkas-berkas sesuai prosedur yang dikordinir pihak sekolah-sekolah negeri diSamarinda.
Bantuan yang diterima sekolah bagi murid miskin dan tidak mampu sudah kami sosialisasikan secara bertahap mengingat program dari pusat ini memakan waktu cukup lama untuk didistribusikan kedaerah-daerah, setiap prosedurnya harus melalui fase verifikasi hingga tervalidasi kebenaran dari kondisi murid yang dapat menerima sesuai yang diisyaratkan program. Semangat program Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini harus tetap ada pada niat walimurid dengan penuh harap membantu mereka meski data yang sudah mereka setor masih dalam tahap antrian.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Peran dinas pendidikan dalam tugas memenuhi kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana sekolah sangat dipengaruhi oleh ketergantungan sekolah pada dana bantuan operasional sekolah (dana bos) yang telah dialokasikan, tetapi pemeliharaan dan perawatan fasilitas sekolah sangat fleksibel dan dinamis sehingga tidak dapat mengakomodir setiap kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan sekolah.
2. Peran dinas pendidikan telah mampu memposisikan masyarakat sebagai fokus pelayanan utama dengan komitmen penyelenggaraan pendidikan gratis agar membuka peluang setiap masyarakat bisa sekolah dengan cara tidak dibebani biaya sekolah.
3. Peran dinas pendidikan telah memanfaatkan alokasi dana bos untuk pengadaan buku-buku bahan pelajaran yang diserahkan kepada perpustakaan sekolah agar diinventarisasi dan dapat memberikan kesempatan pada murid yang tidak mampu untuk meminjam dan setiap penjualan buku-buku langsung oleh distributor penerbit buku tanpa harus melibatkan bisnis tersebut dengan oknum guru disekolah.

4. Peran dinas pendidikan telah dapat menjadi mitra yang cukup baik dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek program pemerintah, demikian peran dinas selalu mendorong pihak sekolah untuk terus berkoordinasi dalam menanggulangi masalah yang terjadi selama jalannya proses belajar mengajar disekolah dengan menjunjung asas keterbukaan atau transparansi sehingga peran dinas dapat segera mengevaluasi hal-hal yang mudah menjadi polemik dimasyarakat segera diatasi.
5. Peran dinas Pendidikan sebagai penyanggah dana memberikan solusi untuk pihak sekolah bersama lembaga komite sekolah melibatkan walimurid dapat bersepakat mengumpulkan dana untuk keperluan kebutuhan mendesak yang tidak mampu ditanggung sepenuhnya oleh dana bos.
6. Faktor penghambat yang terjadi saat peran dinas pendidikan tidak mendapatkan kesesuaian dengan apa yang ditawarkan oleh program pendidikan gratis ini karena hal-hal yang gratis ini tidak sesuai dengan realita kedanaan yang jauh dari kecukupan dan mempengaruhi harapan agar dapat meringankan beban sepenuhnya wali murid sebagai kelompok sasaran (pemanfaat). Selanjutnya peran dinas pendidikan tidak mendapatkan kesesuaian terhadap tugas yang diamanatkan program pendidikan gratis karena kemampuan dinas pendidikan dibatasi hanya sebagai lembaga penyalur dana bos yang telah dialokasikan dari pemerintah pusat sehingga kondisi ini membuat tugas dinas pendidikan harus dapat membagi dana bos tersebut secara proporsional dan transparan keseluruh sekolah negeri di Samarinda. Selanjutnya peran dinas pendidikan sudah menjalankan amanat program meski keterbatasan alokasi dana bos yang diperlukan tetapi terdapat bantuan sosial lainnya sebagai upaya alternatif dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah pusat yang masih sebagian masyarakat dapat terdata sebagaipenerima bantuan tersebut.

Saran

1. Penggunaan alokasi dana bos yang telah diterima pihak sekolah harus lebih proporsional dan berdasarkan kebutuhan yang menjadi skala prioritas, serta harus adanya tranparansi yang disertakan dengan perincian
2. Setiap kebijakan pihak sekolah harus lebih dulu dikordinasikan bersama pihak dinas pendidikan serta melibatkan komite sekolah agar menghindari kesalahpahaman dan kebijakan yang sepihak.
3. Dinas pendidikan dan pihak sekolah harus mampu mengakomodir siswa miskin dan tidak mampu dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan selalu cermat mengelola setiap program bantuan pendidikan agar penerimanya tepat sasaran.

Daftar Pustaka

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Amira. 2012. *Membangun E-Learning dengan Learning Management System Moodle*, PT Berkah Mandiri Globalindo, Jakarta.
- Berry, David. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy. Terjemahan Rick Ismanto)*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rohman, Arif. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*, Laks Bang Mediatama, Yogyakarta.
- Sihombing, Danton. 2001. *Tipografi Dalam Desain Grafis*, Gramedia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suwarno. 1992. *Pengantar Umum Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sumber Dokumen:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Bahasa Indonesia

Sumber Karya Ilmiah:

Suryana, Siti Erna Latifi, 2009. Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang. Tesis. Program Magister Studi Pembangunan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.